

## **HUBUNGAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DENGAN PENYALURAN RUMAH BERSUBSIDI DI KOTA PALEMBANG (Studi Kasus Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan)**

**Jerri Saputra<sup>1)</sup>, Metta Ria Utami<sup>2)</sup>, Mini Faleta<sup>3)</sup>, R.A Ellya Handayani<sup>4)</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Email: jerrysa304@gmail.com

### **Abstrak**

*Low-income people or MBR are people who have limited purchasing power, so they need government support to get housing. In today's era, home as one of the main human needs is a reflection of one's well-being and ability to live life. Socialize. At present the main problem in housing problems in Indonesia is the backlog problem on a national scale. Sharia scheme. Subsidized housing offers a solution for society low income earners to have livable homes at affordable prices because it has received assistance from the government which does not collect value added tax (VAT) like commercial houses. This research is a qualitative descriptive research that explains the phenomena and data as well as previous research, then draws conclusions from the existing problems. From the discussion it can be concluded that the linkages of low-income communities to the distribution of subsidized housing in the city of Palembang help low-income communities to obtain livable housing, because people who have limited ability to buy housing need assistance. and support from the government to obtain subsidized housing. Housing assistance is provided to low-income communities through the provision of long-term funds.*

**Keywords :** *Public, Low Income Society, Subsidized Housing.*

### **Abstract**

*Masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli, sehingga membutuhkan dukungan pemerintah untuk mendapatkan rumah. Pada era sekarang ini, rumah sebagai salah satu kebutuhan utama manusia merupakan cerminan dari kesejahteraan dan kemampuan seseorang dalam menjalani kehidupan. Saat ini permasalahan utama dalam permasalahan perumahan di Indonesia adalah masalah backlog dalam skala nasional. Perumahan bersubsidi menawarkan solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni dengan harga terjangkau. karena telah mendapat bantuan dari pemerintah yang tidak memungut pajak pertambahan nilai (PPN) seperti rumah komersial. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menjelaskan fenomena dan data serta penelitian terdahulu, kemudian menarik kesimpulan dari permasalahan yang ada. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa keterkaitan masyarakat berpenghasilan rendah dalam penyaluran rumah subsidi di kota Palembang membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah yang layak huni, karena masyarakat yang memiliki keterbatasan untuk*

## **Jerri Saputra, Metta Ria Utami, Mini Faleta, R.A Ellya Handayani**

Hubungan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dengan Penyaluran Rumah Bersubsidi Di Kota Palembang (Studi Kasus Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan)

*membeli rumah perlu mendapatkan bantuan. dan dukungan dari pemerintah untuk mendapatkan rumah bersubsidi. Bantuan perumahan diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan dana jangka panjang.*

**Kata Kunci :** *Masyarakat, Masyarakat Berpenghasilan rendah, Rumah Subsidi*

### **Pendahuluan**

Di era sekarang ini rumah sebagai salah satu kebutuhan utama manusia merupakan cerminan kesejahteraan dan kemampuan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Cita-cita pemerintah Indonesia untuk menghadirkan hunian layak huni yang terjangkau oleh MBR dalam prakteknya belum dapat diwujudkan seutuhnya. Perumahan bersubsidi yang diperuntukkan bagi MBR tersebut masih banyak yang tidak memenuhi standar layak huni jika dibandingkan dengan aturan tertulis. Hal ini disebabkan oleh kurang ketatnya pengawasan dari pemerintah dan lemahnya komitmen pengembang perumahan untuk memenuhi hak MBR mendapatkan perumahan yang layak, aman, dan nyaman.

Kemiskinan menggambarkan kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan atau secara lebih rinci menggambarkan suatu kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yaitu pangan, papan dan sandang. Kemiskinan paling besar adalah masyarakat yang tidak memiliki rumah dan pada akhirnya tinggal di kawasan yang tidak layak dihuni. Dengan adanya bantuan pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah yang layak. Perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar mendapatkan rumah yang layak, sehingga masyarakat tidak kesulitan untuk mengetahui atau mendapatkan informasi dari pemerintah kota Palembang, dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah setidaknya selalu berada di depan dalam artian memberikan arahan dan perencanaan pembangunan daerah.

Memberikan fasilitas KPR dapat diterbitkan oleh bank baik secara konvensional maupun dengan prinsip syariah, rumah bersubsidi hanya dapat diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah bukan untuk diberikan kepada ASN, BUMN, anggota TNI atau Polri dan bukan untuk pegawai yang berpenghasilan tinggi, melainkan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah seperti, pedagang, ojek pengkolan dan masih banyak lagi.

## **Kajian Teori**

### **1. Hubungan Masyarakat**

Secara bahasa, humas adalah proses komunikasi yang strategis digunakan oleh satu pihak bisa itu individu, perusahaan atau organisasi untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat. Dalam perusahaan humas merupakan bagian dari organisasi yang bertanggung jawab dalam menyusun rencana komunikasi khusus dengan berbagai media untuk membangun citra. J.C Seidel menyebutkan pengertian apa itu Humas adalah proses berkesinambungan dari usaha-usaha manajemen agar bisa mendapatkan itikad baik dan pengertian dari para pelanggan, karyawan hingga publik secara umum.

### **2. Masyarakat Berpenghasilan Rendah**

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Pasal 126 UU Nomor 11 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kemudahan dan atau bantuan pembiayaan untuk pembangunan dan perolehan rumah umum dan rumah swadaya bagi MBR.

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki kemampuan rendah dalam melakukan pembiayaan dan pembangunan rumah. Hal ini dikarenakan selain tingginya harga lahan, tingginya standard RSH dan sulitnya perjanjian bangunan juga menyangkut pada permasalahan system pembiayaan perumahan yang seringkali kurang *accessible* terhadap kemampuan MBR. Berdasarkan kondisi tersebut, KPR Bersubsidi sebagai sebagai program yang membantu menyediakan hunian layak bagi MBR dengan tingkat penghasilan maksimal 2,5 juta rupiah per bulan mencoba menjembatani permasalahan tersebut. Masyarakat berpenghasilan rendah menjadi sangat diprioritaskan karena selama ini mereka lemah dalam akses kepada perumahan yang terjangkau. Beberapa sekema pembiayaan akhirnya ditawarkan oleh pemerintah untuk mendorong developer menyediakan perumahan yang terjangkau bagi Masyarakat berpenghasilan rendah.

## **Jerri Saputra, Metta Ria Utami, Mini Faleta, R.A Ellya Handayani**

Hubungan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dengan Penyaluran Rumah Bersubsidi Di Kota Palembang (Studi Kasus Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan)

Terdapat tiga segmen MBR berdasarkan kemampuan mengakses kepemilikan rumah yaitu:

1. MBR yang telah memiliki tanah atau rumah namun tidak mampu membangun atau memperbaiki rumahnya.
2. MBR yang mampu membeli rumah namun kemampuan untuk mengangsur KPR masih rendah.
3. MBR yang sama sekali tidak mampu membeli rumah.

### **3. Rumah Bersubsidi**

Rumah bersubsidi adalah rumah yang dibangun dengan harga terjangkau yang diperoleh melalui skema KPR baik secara konvensional maupun dengan skema syariah. Perumahan bersubsidi menawarkan solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian layak dengan harga terjangkau karena telah mendapatkan bantuan dari pemerintah yang tidak mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) layaknya rumah komersial.

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian bangsa. Perumahan dan permukiman tidak dapat hanya dilihat sebagai sarana kebutuhan hidup tetapi lebih dari itu merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan tatanan hidup untuk masyarakat dan dirinya dalam menampakkan jati diri.

Pertumbuhan KPR untuk rumah subsidi yang pesat menciptakan peluang dan optimisme bagi dunia perbankan untuk membiayainya, namun permasalahannya yang kemudian timbul menurut pendapat Marzuki Usman adalah pemilikan rumah melalui fasilitas KPR diraskan kurang berkembang, yang antara lain disebabkan oleh beberapa kendala utama, yaitu:

1. Risiko pendanaan (*Funding Risk*).

Risiko pendanaan yang dihadapi sektor perbankan mencakup dua unsur yaitu risiko likuiditas dan risiko tingkat bunga.

2. Ketidacukupan modal (*Capital Inadequacy*).

Ketidacukupan modal merupakan masalah umum yang dihadapi dunia perbankan, pengalokasian dana dilembaga perbankan bukan hanya untuk KPR saja

tetapi berbagai jenis kredit lain juga, oleh karena itu faktor kesulitan tentang ketidakcukupan modal tentunya akan sangat berpengaruh untuk kredit perumahan.

3. Tingkat bunga riil yang tinggi (*High Real Interest Rate*).

Tingkat bunga riil yang tinggi pada lembaga perbankan mengakibatkan berkurangnya kesempatan anggota masyarakat untuk memperoleh KPR.

4. Risiko kredit (*Credit Risk*).

Dengan adanya risiko kredit yang tidak pasti, disebabkan adanya kredit macet yang pelaksanaan eksekusi dan administrasinya mengalami proses yang berbelit-belit, tidak efisien. Hal ini berkaitan erat dengan masalah kekuatan dan kepastian hukum.

5. Persaingan dengan pihak yang mendapat subsidi (*Subsidized Competition*).

Kompetisi antar lembaga perbankanpun berdampak kurang sehat, karena ada bank yang memperoleh subsidi ada pula yang tidak. Tidak hanya itu pihak bank dalam mencari sumber dana KPR tidak lagi dapat mengandalkan subsidi pemerintah karena dampak subsidi ini dapat berimbas terhadap ekonomi makro.

## Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif sebab penelitian kami menjelaskan fenomena serta data penelitian terdahulu, kemudian menarik kesimpulan dari persoalan yang ada. Tujuan penelitian menggunakan metode ini untuk mendeskripsikan masalah yang diambil dengan lebih akurat dan jelas berdasarkan dengan fakta. Pengumpulan data dengan data sekunder dengan jurnal, berita, dan pengumuman pemerintah yang dianalisis dijelaskan dengan pembahasan.

## Hasil Dan Pembahasan

### 1. Peran Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Berdasarkan peraturan menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2014 tentang fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dalam rangka perolehan rumah melalui kredit atau pembiayaan pemilikan rumah sejahtera bagi

## **Jerri Saputra, Metta Ria Utami, Mini Faleta, R.A Ellya Handayani**

Hubungan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dengan Penyaluran Rumah Bersubsidi Di Kota Palembang (Studi Kasus Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan)

masyarakat berpenghasilan rendah (diubah dengan permen PUPR Nomor 20/PRT/M/2015) kelompok sasaran KPR sejahtera merupakan MBR dengan penghasilan tetap maupun MBR dengan penghasilan yang tidak tetap. Batasan penghasilan kelompok sasaran KPR sejahtera adalah MBR dengan penghasilan maksimal sebesar Rp 4.000.000 untuk rumah tapak dan MBR dengan penghasilan maksimal Rp 7.000.000 untuk rumah susun.

Bentuk kemudahan dan atau bantuan perolehan rumah diberikan bagi MBR berupa (Pembiayaan.pu.go.id) :

1. KPR dengan suku bunga 5% per tahun sepanjang masa pinjaman melalui KPR sejahtera dan KPR SSB/SSM.
2. Subsidi bantuan uang muka perumahan sebesar Rp 4.000.000 untuk pembelian rumah tapak dan pembebasan pajak pertambahan nilai sesuai peraturan perundang-undang.

Banyaknya kebutuhan rumah di Indonesia, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat dunia, terutama pada masyarakat perkotaan dengan populasi penduduknya yang besar, sehingga memerlukan upaya pemerintah untuk menangani permasalahan perumahan ditengah berbagai kendala seperti keterbatasan lahan perumahan.

## **2. Rumah Bersubsidi**

MBR memiliki kemampuan rendah dalam melakukan pembiayaan dan pembangunan rumah. Hal ini dikarenakan selain tingginya harga lahan, tingginya standard RSH dan sulitnya perijinan bangunan juga menyangkut pada permasalahan sistem pembiayaan perumahan yang seringkali kurang accessible terhadap kemampuan MBR. Berdasarkan kondisi tersebut, KPR Bersubsidi sebagai program yang membantu menyediakan hunian layak bagi MBR dengan tingkat penghasilan maksimal 2,5 juta rupiah per bulan mencoba menjembatani permasalahan tersebut. Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian bangsa. Perumahan dan permukiman tidak dapat hanya dilihat sebagai sarana kebutuhan hidup tetapi lebih dari itu merupakan proses bermukim manusia dalam

menciptakan tatanan hidup untuk masyarakat dan dirinya dalam menampakkan jati diri.

Kriteria fisik rumah subsidi berdasarkan Permenpera Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 misalnya memiliki luas lantai bangunan 36m<sup>2</sup>, terdiri dari 2 kamar tidur disertai pencahayaan dan pengudaraan yang baik. Lebar minimum muka bangunan rumah 6 meter, dilengkapi dengan MCK dan dapur serta perumahan di dukung dengan PSU. Berdasarkan kriteria tersebut maka ternyata 81,52 persen hasil pembangunan sangat buah rumah layak huni. Tidak semua masyarakat bisa mendapatkan fasilitas perumahan subsidi, ada beberapa syarat jika ingin mendapatkannya. Syarat mengajukan perumahan subsidi sebagai berikut:

- a. Penerima adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia.
- b. Penerima telah berusia 21 tahun atau telah menikah.
- c. Penerima maupun pasangan suami istri belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah.
- d. Gaji atau penghasilan pokok tidak melebihi 4 juta rupiah untuk sejahtera tapak dan 7 juta rupiah untuk rumah sederhana susun.
- e. Memiliki masa kerja atau usaha minimal 1 tahun.
- f. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) orang pribadi sesuai perundang-undang yang berlaku.

Berikut adalah dokumen pengajuan rumah bersubsidi:

- a. Form aplikasi kredit dilengkapi dengan pas photo terbaru pemohon bersama pasangan.
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri, fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan fotocopy surat nikah.
- c. Slip gaji terakhir atau surat keterangan penghasilan.
- d. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan surat keterangan domisili.
- e. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- f. Fotocopy rekening koran atau tabungan 3 bulan terakhir.
- g. Surat pernyataan belum memiliki rumah dari tempat tinggal.
- h. Surat pernyataan belum pernah menerima subsidi untuk pemilikan rumah dari pemerintah yang dibuat pemohon.

### **Jerri Saputra, Metta Ria Utami, Mini Faleta, R.A Ellya Handayani**

Hubungan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dengan Penyaluran Rumah Bersubsidi Di Kota Palembang (Studi Kasus Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan)

### **3. Program Housing Clinic**

*Housing Clinic* adalah sebuah program yang sedang di kembangkan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dimana program ini memiliki tujuan sebagai tempat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan untuk memiliki rumah yang layak huni di Kawasan Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam proses pembangunan program *Housing Clinic* ini penulis bersama dengan Mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya diberikan tanggung jawab untuk membuat Aplikasi serta menyusun Tim Pokja (Kelompok Kerja) dimana Tim Pokja tersebut terdiri dari setiap bidang maupun bagian di dalam Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

Pada program housing clinic Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan ini selain dapat di akses melalui website masyarakat juga bisa datang langsung ke Dinas Perumahan Dan kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan bertepatan di gedung UPTD PIP2B. Program ini di buat agar dapat memudahkan masyarakat yang kurang memahami sistem digital sehingga bisa langsung berkonsultasi pada Tim Pokja yang telah di bentuk sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Program housing clinic yang telah di rancang sedemikian rupa ini dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai rencana dinas perumahan dan kawasan permukiman provinsi Sumatera selatan serta dapat memudahkan masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni sehingga masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki kehidupan yang sejahtera serta dapat mengurangi tingkat kemiskinan di kota palembang dengan adanya program housing clinic.

Salah satu upaya untuk mendorong terhadap pemenuhan kebutuhan terhadap rumah, diperlukan suatu penyediaan perumahan yang disediakan baik oleh pemerintah maupun swasta. Perumahan tersebut diklasifikasikan menurut tipe dari rumah dengan memperhatikan tingkat keterjangkauan daya beli oleh masyarakat Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sesuai dengan amanat UUD 1945 negara berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut, diantaranya adalah hak mendapatkan tempat tinggal, negara mengatur tentang kebijakan mengenai perumahan dan kawasan permukiman.

## **Simpulan**

Penjelasan di atas menyimpulkan bahwa hubungan masyarakat berpenghasilan rendah dikenal dengan MBR berperan penting terhadap penyaluran rumah bersubsidi di kota Palembang. Banyaknya masyarakat yang berpenghasilan rendah, masyarakat yang mempunyai keterbatasan untuk membeli suatu rumah sehingga perlu mendapat bantuan dan dukungan dari pemerintah untuk memperoleh rumah bersubsidi. Bantuan pemilikan rumah diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan dana dengan jangka panjang dan memberikan fasilitas KPR yang diterbitkan oleh bank baik secara konvensional maupun dengan prinsip syariah, rumah bersubsidi hanya dapat diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah bukan untuk diberikan kepada ASN, BUMN, anggota TNI atau Polri dan bukan untuk pegawai yang berpenghasilan tinggi, melainkan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah seperti, pedagang, ojek pengkolan dan masih banyak lagi. Kemiskinan menggambarkan kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan atau secara lebih rinci menggambarkan suatu kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yaitu pangan, papan dan sandang.

## **Daftar Pustaka**

- Agus, Firdaus, Septia Fanny, and Rona Muliana, 'Efektivitas Implementasi Program Perumahan Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Pekanbaru (Studi Kasus : Kecamatan Tenayan Raya)', *Jurnal Saintis*, 20.02 (2020), 101–109
- Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2021). *Etika Perbankan Syariah: Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish. <https://deepublishstore.com/shop/buku-etika-perbankan-syariah-teori-dan-implementasi/>
- Ardito, Bhinadi. *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2017). Hlm 9.

**Jerri Saputra, Metta Ria Utami, Mini Faleta, R.A Ellya Handayani**

Hubungan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dengan Penyaluran Rumah Bersubsidi Di Kota Palembang (Studi Kasus Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan)

- Fadilla, Choiriyah, & Aravik, H. (2021). *Islamic Marketing: Konsep, Filosofi dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hernawan, Koko. *Jual Beli Perumahan Dengan Klausul Eksonerasi*. (Surabaya: Perpustakaan UPN Surabaya, 2011). Hlm 15.
- Hutagalung, Arie S. *Condominium dan Permasalahannya*, Cet 2. (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2002). Hlm 01.
- Juanita, Astrid, dkk. 'Program Perumahan Rakyat Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Yang Tidak Layak Huni', *Acta Diurnal*, 5.1 (2021), 95-106
- Kusumastuti, Dora, '8686-15706-2-Pb', 4.3 (2015), 541-57
- Indrianingrum, Lulut. 'Rencana Kepemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi Kasus Kelurahan Tanjungmas Kota Semarang)', *Jurnal Teknik Sipil Dan Perencanaan*, 18.1 (2016), 15-20.
- M. Prawiro, 2020, Pengertian Hubungan Masyarakat Menurut Para Ahli, <https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertianhumas.html#:~:text=Pengertian%20Humas%20Menurut%20Para%20Ahli,Agar%20lebih%20memahami&text=Menurut%20J.%20C.%20Sidel%2C%20pengertian%20Humas,karyawan%2C%20dan%20publik%20secara%20umum>.
- Pembiayaan.pu.go.id. 2019. Apa Yang Dimaksud Dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). <http://pembiayaan.pu.go.id/faq/p/10-apa-yang-dimaksud-dengan-masyarakat-berpenghasilan-rendah-mbr>. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2022. Pukul 14.00 WIB.
- Utomo, K. W., Aji, R. H. S., & Aravik, H. (2022). *Islamic Entrepreneurship : Konsep Berwirausaha Ilahiyah*. Jakarta: Media Edu Pustaka.
- Wijayanti, Arum Novia, Winny Astuti, and Galing Yudana, 'Efektifitas Program Kredit Perumahan Rakyat (Kpr) Bersubsidi Dalam Penyediaan Hunian Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Perumahan Bumi Rejo Damai Pekalongan', *Jurnal Region*, 4.1 (2011), 1-10.